Saudi Tegaskan Posisinya Soal Konflik Timur Tengah

written by Harakatuna

Harakatuna.com. New York-Duta Besar Arab Saudi di PBB Abdullah Bin Yahya Al-Muallami, menolak campur tangan asing terkait masalah Libya. Penolakan itu ia sampaikan pada debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB terkait situasi di Timur Tengah dan masalah Palestina.

"Kerajaan Arab Saudi menegaskan posisinya, masalah Palestina adalah masalah penting pertama bagi Kerajaan Arab Saudi dan akan terus mempertahankannya," ujar dia dalam sidang tersebut seperti dilansir *Saudi Gazzete,* Jumat (24/1).

Dia menambahkan, campur tangan asing terkait masalah Libya menyebabkan pergerakan pejuang ekstremis ke Libya. Bahkan, hal itu termasuk pelanggaran resolusi Dewan Keamanan terkait intensifikasi eskalasi militer, serta perpanjangan konflik yang memperdalam penderitaan warga Libya.

Oleh sebab itu, ia mendukung rakyat Libya dan menghormati kehendak dari

mereka. Namun demikian, ia juga mendukung upaya PBB yang bertujuan menghentikan konflik dan menyelesaikan krisis melalui dialog dan solusi diplomatik di sana.

Ia juga mengutarakan terima kasihnya karena pembahasan tersebut dibicarakan kembali di sidang DK PBB. Terlebih, ketika saat ini Israel juga sedang mengupayakan niatnya mengakuisisi beberapa wilayah Palestina di Tepi Barat.

Tak berhenti di situ, Duta Besar tersebut juga mengindikasikan Israel masih memberlakukan undang-undang dan kebijakan anti-Palestina untuk melegalkan sistem penyelesaiannya. Menurut dia, langkah itu sekali lagi telah merampas hak rakyat Palestina.

Muallami juga menyerukan tanggapan Kerajaannya kepada komunitas internasional untuk memaksa Israel agar menerapkan resolusi internasional yang relevan. Sebab jika tidak, kawasan itu akan terus menderita dan konflik yang berkepanjangan akan terus berlanjut.

Dia juga menyatakan kecaman Arab Saudi terkait eskalasi baru-baru ini oleh pemerintah Suriah. Utamanya dalam serangan mereka terhadap warga sipil di Idlib.

Muallami menyerukan ketenangan dan meminta agar ada komitmen menyelesaikan dialog melalui Komite Konstitusi. Sebab, diharapkan agar ada hasil yang bisa mewakili harapan bagi rakyat Suriah, untuk keluar dari krisis berlarut-larut mereka.

“Tahun-tahun terakhir telah membuktikan. Dengan tanpa keraguan, ketidakabsahan hipotesis solusi militer malah mengorbankan rakyat serta keinginan mereka,” kata dia.